



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengaturan mengenai standar biaya dan nomenklatur program/kegiatan yang termuat dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 43 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 43 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, dalam perkembangannya belum memenuhi seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 43 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 /PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

Pasal 1

Ketentuan pada Angka Romawi LI. Bahan Bakar Kendaraan Dinas dan Peralatan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati Buton Nomor 43 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 282), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 43 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2020 Nomor), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 4 Agustus 2020

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
Pada tanggal 4 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2020 NOMOR...306

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 21 TAHUN 2020
TANGGAL : 4 Agustus 2020
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2020 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

I. HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp.) |
|----|--|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | PENGELOLA KEUANGAN /BARANG MILIK DAERAH | | |
| | a. Koordinator Pengelola Keuangan/Pengelola BMD | OB | 2.500.000,- |
| | b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), BUD, Pejabat Penatausahaan BMD | OB | 2.250.000,- |
| | c. Kuasa Bendahara Umum Daerah | OB | 2.000.000,- |
| | d. Pejabat Pengurus Barang Pengelola BMD | OB | 500.000,- |
| | e. Pengguna Anggaran/Barang | | |
| | - Nilai pagu dana s/d Rp. 1.500.000.000,- | OB | 650.000,- |
| | - Nilai pagu dana di atas Rp.1.500.000.000,- s/d Rp. 3.000.000.000,- | OB | 700.000,- |
| | - Nilai pagu dana diatas Rp. 3.000.000.000,- s/d Rp.6.000.000.000,- | OB | 750.000,- |
| | - Nilai pagu dana diatas Rp. 6.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,- | OB | 800.000,- |
| | - Nilai pagu dana diatas Rp. 10.000.000.000,- s/d Rp. 20.000.000.000,- | OB | 850.000,- |
| | - Nilai pagu dana diatas Rp. 20.000.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,- | OB | 900.000,- |
| | - Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,- | OB | 950.000,- |
| | f. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang | | |
| | - Nilai pagu dana s/d Rp. 1.500.000.000,- | OB | 550.000,- |
| | - Nilai pagu dana di atas Rp.1.500.000.000,- s/d Rp. 3.000.000.000,- | OB | 600.000,- |
| | - Nilai pagu dana diatas Rp. 3.000.000.000,- s/d Rp. 6.000.000.000,- | OB | 650.000,- |
| | - Nilai pagu dana diatas Rp. 6.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,- | OB | 700.000,- |
| | - Nilai pagu dana diatas Rp. 10.000.000.000,- s/d Rp. 20.000.000.000,- | OB | 750.000,- |
| | - Nilai pagu dana diatas Rp. 20.000.000.000 s/d Rp.50.000.000.000,- | OB | 800.000,- |
| | - Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,- | OB | 850.000,- |
| 2. | PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) OPD | | |
| | a. Nilai pagu dana s/d Rp. 1.500.000.000,- | OB | 400.000,- |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp.1.500.000.000,- s/d Rp. 3.000.000.000,- | OB | 450.000,- |
| | c. Nilai pagu dana diatas Rp. 3.000.000.000,- s/d Rp.6.000.000.000,- | OB | 475.000,- |

| | | | |
|----|--|----|-----------|
| | d. Nilai pagu dana diatas Rp. 6.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,- | OB | 500.000,- |
| | e. Nilai pagu dana diatas Rp. 10.000.000.000,- s/d Rp. 20.000.000.000,- | OB | 550.000,- |
| | f. Nilai pagu dana diatas Rp. 20.000.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,- | OB | 600.000,- |
| | g. Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,- | OB | 650.000,- |
| 3. | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) | | |
| | a. Nilai pagu dana s/d. Rp. 25.000.000,- | OB | 200.000,- |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- | OB | 225.000,- |
| | c. Nilai pagu dana diatas Rp.50.000.000,- s/d Rp.75.000.000,- | OB | 250.000,- |
| | d. Nilai pagu dana diatas Rp. 75.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- | OB | 275.000,- |
| | e. Nilai pagu dana diatas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 125.000.000,- | OB | 300.000,- |
| | f. Nilai pagu dana diatas Rp. 125.000.000,- s/d Rp. 150.000.000,- | OB | 325.000,- |
| | g. Nilai pagu dana diatas Rp. 150.000.000,- s/d Rp. 175.000.000,- | OB | 350.000,- |
| | h. Nilai pagu dana diatas Rp. 175.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,- | OB | 375.000,- |

| | | | |
|----|---|----|-----------|
| 4. | BENDAHARA PENGELUARAN | | |
| | a. Nilai pagu dana s/d Rp. 1.600.000.000,- | OB | 400.000,- |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp.1.600.000.000,- s/d Rp. 3.100.000.000,- | OB | 425.000,- |
| | c. Nilai pagu dana diatas Rp. 3.100.000.000,- s/d Rp.6.100.000.000,- | OB | 450.000,- |
| | d. Nilai pagu dana diatas Rp. 6.100.000.000,- s/d Rp. 13.100.000.000,- | OB | 475.000,- |
| | e. Nilai pagu dana diatas Rp. 13.100.000.000 s/d Rp.50.000.000.000,- | OB | 500.000,- |
| | f. Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,- | OB | 550.000,- |
| 5. | BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU | | |
| | a. Target Penerimaan s/d Rp. 5.000.000,- | OB | 50.000,- |
| | b. Target Penerimaan diatas Rp. 5.000.000,- s/d Rp.10.000.000,- | OB | 75.000,- |
| | c. Target Penerimaan diatas Rp.10.000.000,- s/d Rp.15.000.000,- | OB | 100.000,- |
| | d. Target Penerimaan diatas Rp.15.000.000,- s/d Rp. 20.000.000,- | OB | 150.000,- |
| | e. Target Penerimaan diatas Rp.20.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- | OB | 200.000,- |
| | f. Target Penerimaan diatas Rp.50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,- | OB | 250.000,- |
| | g. Target Penerimaan diatas Rp.100.000.000,- s/d Rp.500.000.000,- | OB | 275.000,- |
| | h. Target Penerimaan diatas Rp.500.000.000,- s/d Rp.1.000.000.000,- | OB | 325.000,- |
| | i. Target Penerimaan diatas Rp. 1.000.000.000,- | OB | 375.000,- |

| | | | |
|----|---|----|-----------|
| 6. | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU | | |
| | a. Nilai pagu dana s/d Rp. 1.600.000.000,- | OB | 175.000,- |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp.1.600.000.000,- s/d Rp. 3.100.000.000,- | OB | 200.000,- |
| | c. Nilai pagu dana diatas Rp. 3.100.000.000,- s/d Rp.6.100.000.000,- | OB | 205.000,- |
| | d. Nilai pagu dana diatas Rp. 6.100.000.000,- s/d Rp. 13.100.000.000,- | OB | 225.000,- |
| | e. Nilai pagu dana diatas Rp. 13.100.000.000,- s/d Rp.50.000.000.000,- | OB | 250.000,- |
| | f. Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,- | OB | 275.000,- |
| 7. | PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN | | |
| | a. Target Penerimaan s/d Rp. 5.000.000,- | OB | 50.000,- |
| | b. Target Penerimaan diatas Rp. 5.000.000,- s/d Rp.10.000.000,- | OB | 75.000,- |
| | c. Target Penerimaan diatas Rp. 10.000.000,- s/d Rp.15.000.000,- | OB | 100.000,- |
| | d. Target Penerimaan diatas Rp.15.000.000,- s/d Rp.20.000.000,- | OB | 150.000,- |
| | e. Target Penerimaan diatas Rp.20.000.000,- s/d Rp.50.000.000,- | OB | 200.000,- |
| | f. Target Penerimaan diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,- | OB | 250.000,- |
| | g. Target Penerimaan diatas Rp.100.000.000,- s/d Rp.500.000.000,- | OB | 275.000,- |
| | h. Target Penerimaan diatas Rp. 500.000.000,- s/d Rp.1.000.000.000,- | OB | 325.000,- |
| | i. Target Penerimaan diatas Rp. 1.000.000.000,- | OB | 375.000,- |
| 8. | PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN | | |
| | a. Nilai pagu dana s/d Rp. 1.600.000.000,- | OB | 150.000,- |
| | b. Nilai pagu dana di atas Rp.1.600.000.000,- s/d Rp. 3.100.000.000,- | OB | 175.000,- |
| | c. Nilai pagu dana diatas Rp. 3.100.000.000,- s/d Rp.6.100.000.000,- | OB | 200.000,- |
| | d. Nilai pagu dana diatas Rp. 6.100.000.000,- s/d Rp. 13.100.000.000,- | OB | 225.000,- |
| | e. Nilai pagu dana diatas Rp. 13.100.000.000,- s/d Rp.50.000.000.000,- | OB | 250.000,- |
| | f. Nilai pagu dana diatas Rp. 50.000.000.000,- | OB | 275.000,- |
| 9. | PEBENDAHARA PENERIMAAN /PENDAPATAN | | |
| | a. Target Penerimaan s/d Rp. 5.000.000,- | OB | 150.000,- |
| | b. Target Penerimaan diatas Rp. 5.000.000,- s/d Rp.10.000.000,- | OB | 200.000,- |
| | c. Target Penerimaan diatas Rp. 10.000.000,- s/d Rp.15.000.000,- | OB | 250.000,- |
| | d. Target Penerimaan diatas Rp.15.000.000,- s/d Rp.20.000.000,- | OB | 300.000,- |
| | e. Target Penerimaan diatas Rp.20.000.000,- s/d Rp.50.000.000,- | OB | 350.000,- |
| | f. Target Penerimaan diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp.100.000.000,- | OB | 400.000,- |
| | g. Target Penerimaan diatas Rp.100.000.000,- s/d Rp.500.000.000,- | OB | 450.000,- |
| | h. Target Penerimaan diatas Rp. 500.000.000,- s/d Rp.1.000.000.000,- | OB | 500.000,- |
| | i. Target Penerimaan diatas Rp. 1.000.000.000,- | OB | 550.000,- |

Honorarium Pengelola Keuangan Daerah

- 1. Honorarium diberikan kepada Pengelola Keuangan/Barang Milik Daerah yakni :
 - a. Kordinator Pengelola Keuangan/BMD;
 - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), BUD, Pejabat Penatausahaan BMD;
 - c. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - d. Pejabat Pengurus Barang Pengelola BMD;
 - e. Pengguna Anggaran/Barang; dan
 - f. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
- 2. Honorarium diberikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
- 3. Honorarium diberikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 4. Honorarium di berikan kepada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan nilai pagu dana yang dikelola oleh masing-masing SKPD;
- 5. Honorarium diberikan kepada Bendahara Penerimaan/Pendapatan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembantu Bendahara Penerimaan sesuai dengan target penerimaan yang diperoleh.

Pengangkatan Pengelola Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, Selanjutnya besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

Honorarium Pengelola Keuangan Daerah dapat diberikan kepada pengelola kegiatan yang secara langsung mengelola dan melaksanakan kegiatan dan merupakan tambahan tugas yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Honorarium Pengelola Keuangan daerah diberikan setiap bulan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton dengan ketentuan alokasi honorarium dimaksud berasal dari pagu Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing SKPD berkenaan.

II. HONORARIUM PENGELOLA BARANG DAN JASA

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp.) |
|----|---|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA | | |
| | a. Pejabat Pengadaan Barang/jasa | OB | 750.000,- |
| | b. Pejabat Pengadaan / Panitia Pengadaan Barang dan Pokja Pemilihan (Konstruksi, Non Konstruksi dan jasa Konsultansi) | OB | 7.000.000,- |
| 2. | PENATAUSAHAAN BARANG PADA SKPD | | |
| | a. Pengurus Barang Pengguna | OB | 300.000,- |
| | b. Pembantu Pengurus Barang Pengguna | OB | 200.000,- |

Honorarium Pengelola Barang dan Jasa

- 1. Honorarium diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA sebagai Pejabat Pengadaan Barang

/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukkan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2. Honorarium diberikan kepada Pejabat Pengadaan / Panitia Pengadaan Barang dan Pokja Pemilihan (Konstruksi, Non Konstruksi dan jasa Konsultansi).
- 3. Honorarium diberikan kepada Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada SKPD yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan usulan dari masing-masing kepala SKPD. Pemberian honorarium harus memperhatikan dan/atau mempertimbangkan jumlah dan/atau nilai aset tetap yang dikelola oleh masing-masing SKPD, untuk menentukan nilai kewajaran besaran pemberian honorarium.

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh PA/KPA menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja UKPBJ untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja UKPBJ telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka tidak diberikan honorarium dimaksud.

III. HONORARIUM PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PJHPP) DAN PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PEKERJAAN (PPHP)

| NO | URAIAN | JUMLAH ORANG MAX | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|--|------------------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Penanggungjawab/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJHP) | 1 | OB | 500.000,- |
| 2 | Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) | | | |
| | a. Ketua | 1 | OB | 500.000,- |
| | b. Sekretaris | 1 | OB | 450.000,- |
| | c. Anggota | 7 | OB | 400,000,- |

Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJHPP) Dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pekerjaan (PPHP)

- 1. Honorarium diberikan kepada Penanggungjawab/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJHP) yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJHP) untuk melaksanakan pemeriksaan administrasi pelaksanaan Pengadaan barang/jasa melalui penunjukkan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- 2. Honorarium diberikan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melaksanakan pemeriksaan administrasi pelaksanaan Pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Honorarium Penanggungjawab/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJHP) dan Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) diberikan setiap bulan dan dianggarkan dalam DPA- SKPD.

IV. HONORARIUM TIM TEKNIS/TIM PENDUKUNG PENGADAAN BARANG/JASA

| NO | URAIAN | JUMLAH ORANG MAX | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|-------------|------------------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Koordinator | 1 | OB | 450.000,- |
| 2. | Anggota | 1 | OB | 400.000,- |

Honorarium diberikan kepada Tim Teknis sebagai pengelola pengadaan barang/jasa atau tim yang ditetapkan oleh PA untuk membantu, memberi masukan dan melaksanakan tugas tertentu dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Honorarium diberikan kepada Tim Pendukung yang dibentuk PPK untuk membantu pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat administrasi/keuangan.

Honorarium Tim Teknis/Tim Pendukung diberikan setiap bulan dan dianggarkan dalam DPA - SKPD.

V. HONORARIUM NON ASN TENAGA PENUNJANG PELAKSANA KEGIATAN

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp.) |
|----|---|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Operasional Khusus Kegiatan Bupati/Wakil Bupati | | |
| | - Magister (S2) | OB | 3.000.000,- |
| | - Sarjana (S1) | OB | 2.000.000,- |
| | - SMA / Sederajat | OB | 1.000.000,- |
| 2 | Pengadministrasian | OB | 500.000 |
| 3 | Tenaga Fungsional tertentu | OB | 500.000 |
| 4 | Teknis Operasional | OB | 600.000 |
| 5 | Tenaga Operasional Lapangan | OB | 600.000 |
| 6 | Tenaga Pendukung lainnya: | | |
| | a. Sopir Kendaraan Dinas Perorangan / Jabatan: | | |
| | 1). Sopir Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah | OB | 1.000.000,- |
| | 2). Sopir Asisten Sekda dan kepala SKPD | OB | 850.000,- |
| | b. Sopir Mobil Khusus/Operasional | | |
| | 1) Sopir Mobil Ambulance/ Jenazah/Pemadama Kebakaran | OB | 800.000,- |
| | 2) Sopir Mobil Operasional Lapangan Lainnya | OB | 700.000,- |

| | | |
|--|----|-------------|
| c. Bidang Pengelolaan Sampah | | |
| 1) Petugas Kebersihan/Penyapuan | OB | 850.000,- |
| 2) Sopir Mobil Angkutan Sampah | OB | 1.200.000,- |
| 3) Sopir Kendaraan bermotor 3 Roda Angkutan Sampah | OB | 1.200.000,- |
| 4) Petugas Pengangkutan Sampah | OB | 1.200.000,- |

Honorarium Non ASN Tenaga Penunjang Kegiatan diberikan setiap bulan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

Non ASN Tenaga Penunjang Kegiatan diangkat/ditunjuk dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. Pegawai Non ASN Tenaga Penunjang Kegiatan diangkat/ditunjuk oleh Kepala SKPD untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan daerah. Penunjukan Tenaga Penunjang Kegiatan dapat dilakukan setelah yang bersangkutan telah mengabdikan pada pemerintah daerah paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan persetujuan mengabdikan yang diberikan oleh Bupati atau memiliki pengalaman di bidang pemerintahan.

Keputusan pengangkatan/penunjukan tenaga Penunjang Kegiatan paling sedikit memuat:

- Bidang tugas dan Uraian tugas;
- besaran honorarium; dan
- Jangka waktu pengangkatan/penunjukan; dan
- Larangan dan Sanksi.

Bidang tugas Pegawai Non ASN Tenaga Penunjang Kegiatan dikategorikan kedalam 6 (enam) kelompok sebagai berikut:

- Tenaga Operasional Khusus Kegiatan Bupati/Wakil Bupati.
- Tenaga pengadministrasian;
- Tenaga Fungsional Tertentu;
- Tenaga Teknis Operasional;
- Tenaga Operasional Lapangan; dan
- Tenaga Pendukung lainnya.

Nomenklatur Bidang Tugas Tenaga Penunjang Kegiatan dijabarkan sesuai dengan nomenklatur jabatan pelaksana yang membutuhkan tenaga penunjang kegiatan pada masing-masing SKPD. Khusus untuk Tenaga Penunjang Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati, menyesuaikan dengan nomenklatur jabatan Staf Ahli Bupati/Wakil Bupati sedangkan tenaga pendukung lainnya dapat menggunakan nomenklatur diluar jabatan pelaksana, seperti sopir mobil dinas. Nomenklatur jabatan pelaksana dan Staf Ahli Bupati/wakil Bupati berpedoman pada hasil evaluasi jabatan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka sebelum mengangkat/menunjuk Pegawai Non ASN Kepala SKPD wajib:

- a) melakukan identifikasi kebutuhan Tenaga Penunjang Kegiatan berdasarkan analisis beban kerja dan ketersediaan (bezet) pejabat Pelaksana yang ada pada SKPD;
- b) menentukan nomenklatur Tenaga Penunjang Kegiatan sesuai dengan nomenklatur jabatan pelaksana/Staf ahli yang membutuhkan tenaga penunjang; dan
- c) memastikan ketersediaan anggaran untuk honorarium Pegawai Non ASN pada SKPD.

VI. KLASIFIKASI GAJI DAN TUNJANGAN TENAGA DOKTER RESIDEN, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PEGAWAI NON ASN KABUPATEN BUTON.

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|--------------------|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | RSUD | OB | 9.000.000,- |
| 2 | PUKESMAS/ KLINIK : | | |
| | a. Perkotaan | OB | 9.000.000,- |
| | b. Pedesaan | OB | 9.000.000,- |
| | c. Terpencil | OB | 12.000.000,- |
| 3. | DOKTER RESIDENT | OB | 16.500.000,- |

VII. HONORARIUM AJUDAN/PAM- TUP BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN KETUA DPRD

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp.) |
|----|--|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ajudan /PAM-TUP Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD | OB | 1.000.000 |

VIII. HONORARIUM/INSENTIF DOKTER DAN PARAMEDIS

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp.) |
|----|--|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kepala Ruangan | OB | 500.000,- |
| 2. | Penata Anastesi (penanggungjawab anastesi di ruangan OK) | OB | 2.500.000,- |
| 3. | Dokter Spesialis | OB | 25.000.000,- |
| 4. | Penanggungjawab Apoteker Gudang Farmasi | OB | 1.500.000,- |
| 5. | Dokter Umum/Dokter Gigi | OB | 5.500,000,- |
| 6. | Tenaga Kesehatan yang mendapatkan penugasan Khusus | OH | 150.000,- |

IX. HONORARIUM TIM PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp.) |
|----|-----------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Penanggungjawab | OB | 750.000,- |
| 2. | Ketua | OB | 600.000,- |
| 3. | Sekretaris | OB | 500.000,- |
| 4. | Koordinator | OB | 500.000,- |
| 5. | Anggota | OB | 350.000,- |

X. HONORARIUM PANITIA LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA SOSIALISASI /BIMBINGAN TEKNIS/PENYULUHAN /SEMINAR / PERTEMUAN / RAPAT KOORDINASI /DIKLAT.

| NO | URAIAN | JML ORG | SATUAN | BIAYA (RP.) |
|----|--|---------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Nilai Kegiatan s/d Rp. 50.000.000,- | | | |
| | a. Pengarah | 1 | OK | 800.000,- |
| | b. Penanggungjawab | 1 | OK | 750.000,- |
| | c. Ketua | 1 | OK | 700.000,- |
| | d. Sekertaris | 1 | OK | 600.000,- |
| | e. Anggota | 3 | OK | 400.000,- |
| | f. Sekretariat | 2 | OK | 250.000,- |
| 2. | Nilai Kegiatan diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- | | | |
| | a. Pengarah | 1 | OK | 1.000.000,- |
| | b. Penanggungjawab | 1 | OK | 900.000,- |
| | c. Ketua | 1 | OK | 850.000,- |
| | d. Sekertaris | 1 | OK | 700.000,- |
| | e. Anggota | 7 | OK | 450.000,- |
| | f. Sekretariat | 3 | OK | 300.000,- |
| 3. | Nilai Kegiatan diatas Rp. 100.000.000,- | | | |
| | a. Pengarah | 1 | OK | 2.000.000,- |
| | b. Penaggungjawab | 1 | OK | 1.800.000,- |
| | c. Ketua | 1 | OK | 1.700.000,- |
| | d. Sekertaris | 1 | OK | 1.500.000,- |
| | e. Anggota | 7 | OK | 1.250.000,- |
| | f. Sekretariat | 5 | OK | 900.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Lintas Sektor Dalam Rangka Sosialisasi /Bimbingan Teknis/Penyuluhan /Seminar / Pertemuan / Rapat Koordinasi /Diklat,

sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup penyelenggara.

Jumlah personil panitia disesuaikan dengan besaran pagu anggaran yang termuat dalam DPA SKPD

Pembentukan Panitia ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

XI. HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN / SEMINAR /KURSUS /SOSIALISASI/ DIKLAT/ RAPAT KOORDINASI/FOCAL GROUP DISCUSSION (FGD)

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (RP.) |
|----|--|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Penceramah/ Penyaji/ Narasumber (Pejabat/ Tenaga Ahli)/ Asesor/Dewan Hakim /Juri | | |
| | a. Eselon I/ Pejabat Negara | OJ | 1.400.000,- |
| | b. Guru Besar | OJ | 1.200.000,- |
| | c. Doktor | OJ | 1.000.000,- |
| | d. Eselon II | OJ | 1.000.000,- |
| | e. Eselon III | OJ | 900.000,- |
| | f. Eselon IV | OJ | 800.000,- |
| | g. Dosen S2/ Konsultan | OJ | 750.000,- |
| | h. Fungsional | | |
| | 1). Utama | OJ | 500.000,- |
| | 2). Madya | OJ | 450.000,- |
| | 3). Muda | OJ | 400.000,- |
| | 4). Pertama | OJ | 350.000,- |
| | i. Non PNS / masyarakat /Praktisi/Pelaku IKM | OJ | 300.000,- |
| 2. | Moderator | | |
| | a. Guru Besar/ Pakar | OK | 550.000,- |
| | b. Eselon II dan Sederajat | OK | 500.000,- |
| | c. Eselon III dan Sederajat | OK | 450.000,- |
| | d. Eselon IV dan Sederajat | OK | 400.000,- |
| | e. Dosen S2/ S3/ Konsultan | OK | 450.000,- |
| | f. Non Eselon | OK | 350.000,- |
| | g. Non PNS / masyarakat /Praktisi/Pelaku IKM | OK | 300.000,- |
| 3. | Instruktur/Pelatih | | |
| | a. Eselon I/ Pejabat Negara | OJ | 250.000,- |
| | b. Pengarah | OJ | 200.000,- |
| | c. Widyaswara/ Fungsional | OJ | 175.000,- |
| | d. Eselon II | OJ | 150.000,- |
| | e. Eselon III | OJ | 125.000,- |
| | f. Non Eselon/Masyarakat/pelaku IKM | OJ | 100.000,- |
| | g. Pembantu Instruktur | OJ | 100.000,- |
| | h. Notulen | O/Section | 250.000,- |
| | i. Pembawa Acara/ MC/Representase | OK | 300.000,- |
| | j. Pembaca Doa | OK | 300.000,- |

Honorarium Penceramah/ Penyaji/ Narasumber (Pejabat/ Tenaga Ahli)/Asesor/Dewan Hakim /Juri diberikan kepada pegawai ASN / Non ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya, Aparatur Pemerintah Desa / masyarakat.

Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan :

- a) berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara;
- b) berasal dari lingkup SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara atau berkenaan dengan masyarakat.

Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium Penceramah/ Penyaji/ Narasumber (Pejabat/ Tenaga Ahli)/Asesor/Dewan Hakim /Juri adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.

Dalam hal Penceramah/ Penyaji/ Narasumber (Pejabat/ Tenaga Ahli)/Asesor/Dewan Hakim /Juri melakukan perjalanan dinas, dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku Penceramah/ Penyaji/ Narasumber (Pejabat/ Tenaga Ahli)/Asesor/Dewan Hakim /Juri.

Honorarium Moderator diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar /Kursus /Sosialisasi/ Diklat/ Rapat Koordinasi/Focal Group Discusion (FGD) Kegiatan Sejenis.

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a) berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara;
- b) berasal dari lingkup SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara atau berkenaan dengan masyarakat.

Dalam hal Moderator melakukan perjalanan dinas, Moderator dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku Moderator.

Honorarium Instruktur/Pelatih diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai Instruktur/Pelatih pada kegiatan Seminar /Kursus /Sosialisasi/ Diklat/ Rapat Koordinasi/Focal Group Discusion (FGD) Kegiatan Sejenis.

Honorarium Instruktur/Pelatih dapat diberikan dengan ketentuan:

- a) berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara;
- b) berasal dari lingkup SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara atau berkenaan dengan masyarakat.

Dalam hal Instruktur/Pelatih melakukan perjalanan dinas, Instruktur/Pelatih dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku Instruktur/Pelatih.

XII. HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN KHUSUS KEAGAMAAN

| No. | Uraian | Satuan | Biaya (Rp.) |
|-----|---------------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dewan Hakim Lomba / Juri | OJ | 1.400.000,- |
| 2. | Pelatih (MTQ, STQ, LASQI) | OJ | 300.000,- |

| | | | |
|-----|----------------------------------|----|-----------|
| 3. | Panitera | OJ | 300.000,- |
| 4. | Pembaca alquran | OK | 400.000,- |
| 5. | Imam Shalat Pelaksanaan Kegiatan | OK | 400.000,- |
| 6. | Naib Imam | OK | 400.000,- |
| 7. | Naib Khatib | OK | 400.000,- |
| 8. | Pengantar Kursus Kilat | OK | 300.000,- |
| 9. | Pengantar Takbir | OK | 300.000,- |
| 10. | Pengantar Dzikir | OK | 300.000,- |
| 11. | Pembaca Doa | OK | 300.000,- |

Honorarium Dewan Hakim Lomba / Juri, Pelatih (MTQ, STQ, LASQI), Panitera, Pembaca alquran, Imam Shalat Pelaksanaan Kegiatan, Naib Imam, Naib Khatib, Pengantar Kursus Kilat, Pengantar Takbir, Pengantar Dzikir, dan Pembaca Doa diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Non ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan khusus keagamaan.

Honorarium Dewan Hakim Lomba / Juri, Pelatih (MTQ, STQ, LASQI), Panitera, Pembaca alquran, Imam Shalat Pelaksanaan Kegiatan, Naib Imam, Naib Khatib, Pengantar Kursus Kilat, Pengantar Takbir, Pengantar Dzikir, dan Pembaca Doa dapat diberikan dengan ketentuan :

- a) berasal dari luar lingkup SKPD penyelenggara;
- b) berasal dari lingkup SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara atau berkenaan dengan masyarakat.

Dalam hal Dewan Hakim Lomba / Juri, Pelatih (MTQ, STQ, LASQI), Panitera, Pembaca alquran, Imam Shalat Pelaksanaan Kegiatan, Naib Imam, Naib Khatib, Pengantar Kursus Kilat, Pengantar Takbir, Pengantar Dzikir, dan Pembaca Doa melakukan perjalanan dinas, dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium.

XIII. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp.) |
|----|-------------------------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH | | |
| | a. Penanggung Jawab | OK | 300.000,- |
| | b. Redaktur | OK | 250.000,- |
| | c. Penyunting/Editor | OK | 200.000,- |
| | d. Desain Grafis/ Fotografer | | |
| | - PNS | OK | 150.000,- |
| | - Non PNS | OK | 100.000,- |
| | e. Pembuat Artikel | OK | 100.000,- |
| 2. | Honorarium Tim Pengelola Website | | |
| | a. PenanggungJawab | OB | 550.000,- |
| | b. Ketua | OB | 500.000,- |
| | c. Sekretaris | OB | 450.000,- |
| | d. Redaktur | OB | 450.000,- |

| | | |
|----------------------------|-------|-----------|
| e. Editor | OB | 400.000,- |
| f. Web Admin | OB | 350.000,- |
| g. Web Developer (Non PNS) | OB | 300.000,- |
| h. Anggota | OB | 250.000,- |
| i. Pembuat Artikel | | |
| - PNS | O/Hal | 100.000,- |
| - Non PNS | O/Hal | 150.000,- |

XIV. HONORARIUM PANITIA /TIM LINTAS SEKTOR PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUP KABUPATEN BUTON

| NO | URAIAN | JUMLAH ORG (max) | SATUAN | BIAYA (RP.) |
|----|--|------------------------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Nilai Kegiatan s/d Rp. 50.000.000,- | | | |
| | a. Pengarah | 1 | OK | 2.000.000,- |
| | b. Penanggungjawab | 1 | OK | 1.750.000,- |
| | c. Ketua | 1 | OK | 1.500.000,- |
| | d. Sekertaris | 1 | OK | 1.250.000,- |
| | e. Anggota | 8 | OK | 1.000.000,- |
| | f. Sekretariat | 3 | OK | 500.000,- |
| 2. | Nilai Kegiatan diatas Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- | | | |
| | a. Pengarah | 1 | OK | 2.500.000,- |
| | b. Penanggungjawab | 1 | OK | 2.250.000,- |
| | c. Ketua | 1 | OK | 2.000.000,- |
| | d. Sekertaris | 1 | OK | 1.750.000,- |
| | e. Anggota | 20 | OK | 1.500.000,- |
| | f. Sekretariat | 5 | OK | 750.000,- |
| 3. | Nilai Kegiatan diatas Rp. 100.000.000,- | | | |
| | a. Pengarah | 1 | OK | 3.500.000,- |
| | b. Penaggungjawab | 1 | OK | 3.000.000,- |
| | c. Ketua | 1 | OK | 2.500.000,- |
| | d. Sekertaris | 1 | OK | 2.250.000,- |
| | e. Anggota | 35 | OK | 2.000.000,- |
| | f. Sekretariat | 10 | OK | 1.000.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Tim Lintas Sektor Penyusunan Dokumen.

Jumlah personil Tim Lintas Sektor Penyusunan Dokumen disesuaikan dengan besaran pagu anggaran yang termuat dalam DPA SKPD

Pembentukan Tim Lintas Sektor Penyusunan Dokumen ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Tim diberikan setiap kegiatan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XV. HONORARIUM TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH

| NO | URAIAN | JUMLAH ORG (MAX) | SATUAN | BIAYA (RP.) |
|----|---------------------|---------------------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ketua | 1 | OK | 3.500.000,- |
| 2. | Wakil Ketua I | 1 | OK | 3.000.000,- |
| 3. | Wakil Ketua II | 1 | OK | 3.000.000,- |
| 4. | Sekretaris | 1 | OK | 2.500.000,- |
| 5. | Anggota Tetap | 5 | OK | 1.500.000,- |
| 6. | Anggota Tidak Tetap | 4 | OK | 1.500.000,- |
| 7. | Sekretariat Tim | 10 | OK | 1.000.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Tim Koordinasi Kerjasama Daerah.

Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Tim diberikan setiap kegiatan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XVI. HONORARIUM TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BUTON

| NO | URAIAN | JUMLAH ORG (MAX) | SATUAN | BIAYA (RP.) |
|----|------------------|---------------------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Penanggungjawab | | | |
| 2. | Ketua | | | |
| 3. | Wakil Ketua | 1 | OK | 2.500.000,- |
| 4. | Sekretaris | 1 | OK | 2.000.000,- |
| 5. | Wakil Sekretaris | 1 | OK | 1.750.000,- |

| | | | | |
|-----|------------------------------|----|----|-------------|
| 6. | Ketua Kelompok Program | 4 | OK | 1.500.000,- |
| 7. | Wakil Ketua Kelompok Program | 4 | OK | 1.250.000,- |
| 8. | Anggota Kelompok Program | 16 | OK | 1.000.000,- |
| 9. | Ketua Pokja | 3 | OK | 1.500.000,- |
| 10. | Wakil Ketua Pokja | 3 | OK | 1.250.000,- |
| 11. | Anggota Pokja | 12 | OK | 1.000.000,- |
| 12. | Kepala Sekretariat | 1 | OK | 1.250.000,- |
| 13. | Wakil Kepala Sekretariat | 1 | OK | 1.000.000,- |
| 14. | Anggota Sekretariat | 4 | OK | 800.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Buton.

Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Buton ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Tim diberikan setiap kegiatan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XVII. HONORARIUM PANITIA KEGIATAN PENGAMBILAN SUMPAH APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

| NO | URAIAN | JUMALH ORANG MAX | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|-----------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pengarah | 1 | OK | 2.000,000,- |
| 2. | Penanggungjawab | 1 | OK | 1.750.000,- |
| 3. | Ketua | 1 | OK | 1.500.000,- |
| 4. | Sekretaris | 1 | OK | 1.250.000,- |
| 5. | Anggota | 25 | OK | 1.000.000,- |
| 6. | Sekretariat | 5 | OK | 750.000,- |
| 7. | Pengukuh Sumpah | 5 | OK | 500.000,- |
| 8. | Saksi | 2 | OK | 400.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Panitia Kegiatan Pengambilan Sumpah Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton.

Pembentukan Panitia Kegiatan Pengambilan Sumpah Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Panitia diberikan setiap kegiatan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XVIII. HONORARIUM TIM LINTAS SEKTOR PELAKSANAAN KEGIATAN (NON DOKUMEN)

| NO | URAIAN | JUMLAH ORG (max) | SATUAN | BIAYA (RP.) |
|----|--|------------------------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Nilai Kegiatan s/d Rp. 50.000.000,- | | | |
| | a. Penanggungjawab | 1 | OK | 1.750.000,- |
| | b. Ketua | 1 | OK | 1.500.000,- |
| | c. Sekertaris | 1 | OK | 1.250.000,- |
| | d. Anggota | 10 | OK | 1.000.000,- |
| | e. Sekretariat | 3 | OK | 500.000,- |
| 2. | Nilai Kegiatan diatas Rp. 50.000.000,- | | | |
| | a. Penanggungjawab | 1 | OK | 2.250.000,- |
| | b. Ketua | 1 | OK | 2.000.000,- |
| | c. Sekertaris | 1 | OK | 1.750.000,- |
| | d. Anggota | 20 | OK | 1.500.000,- |
| | e. Sekretariat | 5 | OK | 1.000.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Tim Lintas Sektor Penyusunan Non Dokumen.

Jumlah personil Tim Lintas Sektor Penyusunan Non Dokumen disesuaikan dengan besaran pagu anggaran yang termuat dalam DPA SKPD.

Pembentukan Tim Lintas Sektor Penyusunan Non Dokumen ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Tim diberikan setiap kegiatan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XIX. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN SAKSI LITIGASI DALAM PERSIDANGAN DAN BERACARA

| NO | URAIAN | JUMLAH ORG (max) | SATUAN | BIAYA (RP.) |
|----|--------------------------------|------------------------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pemberi Keterangan Saksi Fakta | 5 | O/Kali | 1.000.000,- |
| 2. | Beracara | 5 | O/Kali | 1.800.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan keterangan saksi Litigasi dalam persidangan.

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk beracara dalam persidangan.

Honorarium diberikan setiap orang/kali dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XX. HONORARIUM PELIPUT KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp.) |
|----|-----------------------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Peliput Kegiatan Pemeritah Daerah | | |
| | a. PNS | OK | 350.000,- |
| | b. Non PNS | OK | 500.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara / Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Peliput Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton.

Penunjukan Peliput Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium sekretariat penyidik diberikan setiap kegiatan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XI. SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

| NO | URAIAN | JUMLAH ORG (MAX) | SATUAN | BIAYA (Rp.) |
|----|-----------------------------|------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ketua | 1 | OB | 250.000,- |
| 2. | Pelaksana Tugas Harian | 1 | OB | 225.000,- |
| 3. | Sekretaris | 1 | OB | 200.000,- |
| 4. | Koordinator Operasional | 1 | OB | 175.000,- |
| 5. | Anggota (Unsur Kepala SKPD) | 5 | OB | 150.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Buton.

Pembentukan sekretariat penyidik pegawai negeri sipil daerah kabupaten buton ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium sekretariat penyidik diberikan setiap bulan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XXII. TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI KABUPATEN BUTON

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp.) |
|----|---------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pengarah | OB | 600.000,- |
| 2. | Ketua | OB | 550.000,- |
| 3. | Wakil Ketua | OB | 500.000,- |
| 4. | Sekretaris Umum | OB | 450.000,- |
| 5. | Sekretaris Teknis | OB | 400.000,- |
| 6. | Anggota | OB | 350.000,- |
| 7. | Anggota Sekretariat | OB | 300.000,- |
| 8. | Operator | OB | 250.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Buton.

Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Buton ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Tim diberikan setiap bulan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XXIII. MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI

| NO | URAIAN | JML ORG (MAX) | SATUAN | BIAYA (Rp.) |
|----|--|---------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI | | | |
| | a. Ketua Merangkap Anggota | 1 | OB | 1.350.000,- |
| | b. Wakil Ketua Merangkap Anggota | 1 | OB | 1.050.000,- |
| | c. Sekretaris Merangkap Anggota | 1 | OB | 1.050.000,- |
| | d. Anggota | 4 | OB | 850.000,- |
| 2. | SEKRETARIAT MAJELIS TUNTUTAN GANTI RUGI | | | |
| | a. Ketua | 1 | OB | 850.000,- |
| | b. Wakil Ketua | 1 | OB | 850.000,- |
| | c. Sekretaris | 1 | OB | 850.000,- |
| | d. Anggota | 25 | OB | 800.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Buton dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Buton.

Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Buton dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Buton ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Tim diberikan setiap bulan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XXIV. SATGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

| NO | URAIAN | JUMLAH ORG (MAX) | SATUAN | BIAYA (Rp.) |
|----|-----------------|---------------------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Penanggungjawab | 11 | OK | 1.000.000,- |
| 2. | Ketua Pelaksana | 1 | OK | 750.000,- |
| 3. | Wakil I | 1 | OK | 600.000,- |
| 4. | Wakil II | 1 | OK | 600.000,- |
| 5. | Sekretaris | 1 | OK | 500.000,- |
| 6. | Kepala Bidang | 2 | OK | 450.000,- |
| 7. | Anggota Bidang | 2 | OK | 400.000,- |
| 8. | Ketua POKJA | 4 | OK | 450.000,- |
| 9. | Anggota POKJA | 10 | OK | 400.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar diwilayah Kabupaten Buton.

Pembentukan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar diwilayah Kabupaten Buton ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Tim diberikan setiap kegiatan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XXV. HONORARIUM KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH KABUPATEN BUTON (FORUM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH/MASYARAKAT)

| NO | URAIAN | JUMLAH ORANG MAX | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|--------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ketua | 1 | - | - |
| 2. | Pelaksanaan Harian | 1 | OB | 1.200.000,- |
| 3. | Sekretaris | 1 | OB | 1.000.000,- |
| 4. | Anggota | 28 | OB | 800.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Forum Komunitas Intelegen Daerah Kabupaten Buton dan Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah/Masyarakat diwilayah Kabupaten Buton.

Pembentukan Forum Komunitas Intelegen Daerah Kabupaten Buton dan Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah/Masyarakat diwilayah Kabupaten Buton ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Tim diberikan setiap bulan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XXVI. HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KABUPATEN BUTON.

| NO | URAIAN | JUMLAH ORANG MAX | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|---------|------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ketua | 1 | OB | 3.000.000,- |
| 2. | Anggota | 4 | OB | 2.500.000,- |

Honorarium diberikan kepada unsur Musyawarah Pimpinan Daerah yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Buton.

Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Buton ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Tim diberikan setiap bulan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XXVII. HONORARIUM TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

| NO | URAIAN | JUMLAH ORANG MAX | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|------------------|------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ketua | 1 | OB | 2.000.000,- |
| 2. | Wakil Ketua I | 1 | OB | 1.750.000,- |
| 3. | Wakil Ketua II | 1 | OB | 1.750.000,- |
| 4. | Pelaksana Harian | 1 | OB | 1.500.000,- |
| 5. | Sekretaris | 1 | OB | 1.000.000,- |
| 6. | Anggota | 15 | OB | 850.000,- |
| 7. | Staf Sekretariat | 7 | OB | 700.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Buton.

Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Buton ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Tim diberikan setiap bulan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XXVIII. HONORARIUM PENGELOLA APLIKASI PERENCANAAN (E-PLANING)

| NO | URAIAN | JMLORG (MAX) | SATUAN | BIAYA (Rp.) |
|----|----------------------------------|--------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Admin | 5 | OK | 400.000,- |
| 2. | Verifikator | 15 | OK | 350.000,- |
| 3. | Admin e-Planing Perangkat Daerah | 38 | OK | 350.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Tim Pengelola Aplikasi Perencanaan (E-Plening).

pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Perencanaan (E-Plening) ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Tim diberikan setiap kegiatan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XXIX. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PETUGAS KEAMANAN PEMILIHAN KEPALA DESA LINGKUP KABUPATEN BUTON

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp.) |
|----|---|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN | | |
| | a. Pengarah | OB | 1.500.000,- |
| | b. Penanggungjawab | OB | 1.250.000,- |
| | c. Ketua | OB | 1.000.000,- |
| | d. Sekretaris | OB | 900.000,- |
| | e. Bendahara | OB | 750.000,- |
| | f. Anggota | OB | 700.000,- |
| | g. Staf Sekretariat | OB | 600.000,- |
| 2. | PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KECAMATAN | | |
| | a. Penanggungjawab | OB | 600.000,- |
| | b. Ketua | OB | 500.000,- |
| | c. Sekretaris | OB | 400.000,- |
| | d. Bendahara | OB | 300.000,- |
| | e. Anggota | OB | 300.000,- |
| 3. | PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA | | |
| | a. Ketua | OB | 600.000,- |
| | b. Wakil Ketua | OB | 500.000,- |
| | c. Sekretaris | OB | 400.000,- |
| | d. Bendahara | OB | 300.000,- |
| | e. Anggota | OB | 300.000,- |
| 4. | PETUGAS KEAMANAN PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA | | |
| | a. Ketua | OK | 500.000,- |
| | b. Wakil Ketua | OK | 450.000,- |
| | c. Sekretaris | OK | 400.000,- |
| | d. Bendahara | OK | 300.000,- |
| | e. Anggota | OK | 300.000,- |

Honorarium diberikan kepada TNI/Polri, Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Petugas Keamanan Pemilihan Kepala Desa Lingkup Kabupaten Buton.

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Petugas Keamanan Pemilihan Kepala Desa Lingkup Kabupaten Buton ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Panitia diberikan setiap bulan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XXX. HONORARIUM TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN KABUPATEN BUTON (TP2K KB/TIM PUSAT) DAN (TP2K KB/TIM DAERAH)

| NO | URAIAN | JMLORG (MAX) | SATUAN | BIAYA (Rp.) |
|----|---|-----------------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Tim Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Kabupaten Buton (TP2K KB/Tim Pusat) | | | |
| | a. Koordinator Tim | 1 | OB | 2.000.000,- |
| | b. Wakil Koordinator | 1 | OB | 1.700.000,- |
| | c. Sekretaris | 1 | OB | 1.300.000,- |
| | d. Anggota | 25 | OB | 1.200.000,- |
| | Sekretariat : | | | |
| | a. Kerjasama | 1 | OB | 1.000.000,- |
| | b. Operator Computer | 3 | OB | 1.000.000,- |
| 2. | Tim Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Kabupaten Buton (TP2K KB/Tim Daerah) | | | |
| | a. Koordinator Tim | 1 | OB | 1.700.000,- |
| | b. Wakil Koordinator | 1 | OB | 1.600.000,- |
| | c. Sekretaris | 1 | OB | 1.500.000,- |
| | d. Wakil Sekretaris | 1 | OB | 1.200.000,- |
| | e. Anggota | 21 | OB | 1.000.000,- |
| | f. Sekretariat | 5 | OB | 750.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Kabupaten Buton (TP2K KB/TIM PUSAT) dan (TP2K KB/TIM DAERAH).

Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Kabupaten Buton (TP2K KB/TIM PUSAT) dan (TP2K KB/TIM DAERAH) ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Panitia diberikan setiap bulan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XXXI. HONORARIUM TIM PEMUTAKHIRAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI BASIS DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN

| NO | URAIAN | JUMLAH ORANG MAX | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|----------------------------|------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pengarah | 1 | OK | 1.500.000,- |
| 2. | Penanggungjawab/Supervisor | 1 | OK | 1.250.000,- |
| 3. | Koordinator Kabupaten | 1 | OK | 1.000.000,- |
| 4. | Operator Online/Admin | 2 | OK | 1.500.000,- |
| 5. | Pengelola Data | 15 | OK | 700.000,- |
| 6. | Koordinator Kecamatan | 7 | OK | 750.000,- |
| 7. | Pengawas/Pemeriksa | 7 | OK | 750.000,- |
| 8. | Pengumpul data | 100 | OK | 100.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Tim Pemutakhiran, Verifikasi Dan Validasi Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Pembentukan Tim Pemutakhiran, Verifikasi Dan Validasi Basis Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Panitia diberikan setiap kegiatan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XXXII. HONORARIUM TIM KECAMATAN KEGIATAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA FAKIR MISKIN KABUPATEN BUTON

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|-------------------------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pelaksana Tim Kecamatan | OB | 500.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Tim Kecamatan Kegiatan Verifikasi Dan Validasi Data Fakir Miskin Kabupaten Buton.

Pembentukan Tim Kecamatan Kegiatan Verifikasi Dan Validasi Data Fakir Miskin Kabupaten Buton ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Panitia diberikan setiap bulan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XXXIII. HONORARIUM PENDAMPING SOSIAL, OPERATOR DAN KOORDINATOR KABUPATEN

| NO | URAIAN | JUMLAH ORANG MAX | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|-----------------------|------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Koordinator Kabupaten | 2 | OB | 1.000.000,- |
| 2. | Operator | 1 | OB | 500.000,- |
| 3. | Pendamping sosial | 31 | OB | 500.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Pendamping Sosial, Operator Dan Koordinator Kabupaten

Pembentukan Pendamping Sosial, Operator Dan Koordinator Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Panitia diberikan setiap bulan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XXXIV. HONORARIUM TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN SECARA NON TUNAI

| NO | URAIAN | JUMLAH ORANG MAX | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|-----------------|------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pengarah | 1 | OB | 1.750.000,- |
| 2. | Penanggungjawab | 1 | OB | 1.625.000,- |
| 3. | Ketua | 1 | OB | 1.500.000,- |
| 4. | Wakil Ketua | 1 | OB | 1.250.000,- |
| 5. | Sekretaris | 1 | OB | 1.125.000,- |
| 6. | Koordinator | 4 | OB | 500.000,- |
| 7. | Anggota | 10 | OB | 250.000,- |
| 8. | Sekretariat | 5 | OB | 200.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Secara Non Tunai.

Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Secara Non Tunai ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Panitia diberikan setiap bulan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XXXV. HONORARIUM TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN KABUPATEN BUTON.

| NO | URAIAN | JUMLAH ORANG MAX | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|------------|------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ketua | 1 | OB | 1.500.000,- |
| 2. | Sekretaris | 1 | OB | 1.000.000,- |
| 3. | Anggota | 21 | OB | 850.000,- |

XXXVI. HONORARIUM KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)

| NO | URAIAN | JUMLAH ORANG MAX | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|----------------------------|------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Penanggungjawab | 1 | OB | 1.000.000,- |
| 2. | Ketua | 1 | OB | 750.000,- |
| 3. | Sekretaris | 1 | OB | 700.000,- |
| 4. | Bendahara | 1 | OB | 650.000,- |
| 5. | Pekerja Sosial Profesional | 1 | OB | 600.000,- |
| 6. | Psikolog | 1 | OB | 600.000,- |
| 7. | Tenaga Kesehatan | 1 | OB | 600.000,- |
| 8. | Polisi | 1 | OB | 600.000,- |
| 9. | Ahli Hukum | 1 | OB | 600.000,- |
| 10. | Ahli Agama | 1 | OB | 600.000,- |
| 11. | Ahli pendidikan | 1 | OB | 600.000,- |

XXXVII. HONORARIUM PENDAMPING SOSIAL, OPERATOR DAN KOORDINATOR KABUPATEN PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN BUTON.

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|-------------------------------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Koordinator Kabupaten | OB | 500.000,- |
| 2. | Operator | OB | 500.000,- |
| 3. | Pendamping Sosial (Kecamatan) | OB | 500.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Pendamping Sosial, Operator Dan Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan Kabupaten Buton.

Pembentukan Pendamping Sosial, Operator Dan Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan Kabupaten Buton ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Panitia diberikan setiap bulan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XXXVIII. HONORARIUM TIM PENGEPAKAN OBAT-OBATAN (*REPACKING*)

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp.) |
|----|------------------------------------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Koordinator Pengemasan Obat-obatan | OK | 100.000,- |
| 2 | Anggota Pengemasan Obat-obatan | OK | 75.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Tim Pengemasan Obat-Obatan (*REPACKING*).

Pembentukan Tim Pengemasan Obat-Obatan (*REPACKING*) ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Panitia diberikan setiap kegiatan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XXXIX. HONORARIUM TIM TEKNIS DANA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp.) |
|----|---|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Penanggungjawab Tim Teknis Dana Jampersal | OB | 750.000,- |
| 2. | Ketua Tim Teknis Dana Jampersal | OB | 600,000,- |
| 3. | Koordinator Kegiatan Tim Teknis Dana Jampersal | OB | 500,000,- |
| 4. | Anggota Tim Teknis Dana Jampersal | OB | 350,000,- |
| 5. | Fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten | OB | 1.500.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Tim Teknis Dana Jaminan Persalinan (JAMPERSAL).

Pembentukan Tim Teknis Dana Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Panitia diberikan setiap bulan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XL. HONORARIUM OPERATOR E-MON DAK

| NO | URAIAN | JUMLAH ORANG MAX | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|----------------------|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pegawai Negeri Sipil | 1 | OK | 2.000.000,- |
| 2. | Non PNS | 1 | OK | 1.750.000,- |

XLI. HONORARIUM TIM PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KABUPATEN BUTON

| NO | URAIAN | JUMLAH ORANG MAX | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|---|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pengarah | | | |
| 2. | Penanggungjawab | 1 | OB | 500.000,- |
| 3. | Tim Pelaksana Pendidikan Dasar (SD dan SMP) | | | |
| | a. Ketua | 1 | OB | 400.000,- |
| | b. Unit Monitoring dan Evaluasi SD | 1 | OB | 400.000,- |
| | c. Unit Monitoring dan Evaluasi SMP | 1 | OB | 350.000,- |
| | d. Pelayanan Pengaduan Masyarakat | 1 | OB | 350.000,- |
| 4 | Penanggungjawab Data SD | | | |
| | a. Koordinator | 1 | OB | 350.000,- |
| | b. Anggota | 3 | OB | 300.000,- |
| 5 | Penanggungjawab Data SMP | | | |
| | a. Koordinator | 1 | OB | 350.000,- |
| | b. Anggota | 3 | OB | 300.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Buton.

Pembentukan Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Buton ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Panitia diberikan setiap bulan dan dianggarkan pada DPA – SKPD.

XLII. HONORARIUM DAK NON FISIK PELAYANAN KEPARIWISATAAN

| NO | URAIAN | JUMLAH ORANG MAX | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|------------------------------------|------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | NARASUMBER/ INSTRUKTUR | | | |
| | a. Keynote Speker | 1 | OK | 1.000.000,- |
| | b. Narasumber | 6 | OJ | 400.000,- |
| | c. Instruktur | 10 | OJ | 200.000,- |
| | d. Asisten/Pembantu Instruktur | 10 | OJ | 100.000,- |
| | e. Moderator | 1 | OK | 450.000,- |
| | f. Pembaca Doa | 1 | OK | 300.000,- |
| | g. MC | 1 | OK | 300.000,- |
| B. | PESERTA | | | |
| | a. Uang Saku | 150 | OH | 100.000,- |
| | b. Transport | 150 | OK | 100.000,- |
| C. | TENAGA PENDAMPING (tenaga Kontrak) | 3 | OK | 6.000.000,- |
| | a. Tenaga Pendamping | 2 | OB | 3.000.000,- |
| | b. Koordinator Pendamping | 1 | OB | 3.000.000,- |

XLIII. BIAYA PESERTA KEGIATAN SELAM (DIVING)

| NO | URAIAN | JUMLAH ORANG | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|-------------|--------------|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Open Water | 1 | OK | 12.000.000,- |
| 2. | Advance | 1 | OK | 10.000.000,- |
| 3 | Rescue | 1 | OK | 12.000.000,- |
| 4 | Dive Master | 1 | OK | 20.000.000,- |

Komponen biaya peserta kegiatan selam (Diving) terdiri atas:

- a) honorarium instruktur;
- b) akomodasi/ transport;
- c) makan minum;
- d) sewa alat; dan
- e) pembuatan dokumen peserta (sertifikat)

Penunjukan peserta Kegiatan Selam ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

XLIV. HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN BUTON

| NO | URAIAN | JUMLAH ORANG MAX | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|--------------------------|------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pembina | | | |
| 2. | Ketua | 1 | OK | 4.250.000,- |
| 3. | Sekretaris | 1 | OK | 4.000.000,- |
| 4. | Sekretariat | 30 | OK | 2.000.000,- |
| 5. | Tim Sistim Informasi | | | |
| | a. Admin | 1 | OK | 3.000.000,- |
| | b. Call Center/Help Desk | 1 | OK | 2.500.000,- |
| | c. Verifikator | 4 | OK | 2.500.000,- |
| 6. | Tim Pelaksana | 6 | OK | 2.500.000,- |
| 7. | Tim Pemantau | 4 | OK | 2.500.000,- |
| 8. | Pengamanan | 1 | OK | 2.000.000,- |
| 9. | Pengawas | 1 | OH | 300.000,- |
| 10. | Teknisi | 1 | OH | 300.000,- |
| 11. | Petugas Kebersihan | 1 | OH | 300.000,- |
| 12. | Operator Kumputer | 1 | OH | 300.000,- |
| 13. | Petugas Keamanan | 1 | OH | 300.000,- |
| 14. | Petugas Pengamanan | 2 | OH | 300.000,- |
| 15. | Pengawas Ujian Eksternal | 2 | OJ | 200.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Buton.

Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Buton ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Panitia dianggarkan pada DPA - SKPD.

XLV. HONORARIUM PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI

| NO | URAIAN | JUMLAH ORANG MAX | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|------------------------------|------------------|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ketua Merangkap Anggota | 1 | OK | 12.000.000,- |
| 2. | Sekertaris Merangkap Anggota | 1 | OK | 11.000.000,- |
| 3. | Anggota | 5 | OK | 10.000.000,- |
| 4. | Staf Sekretariat | 5 | OK | 1.500.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi lingkup Pemerintah Kabupaten Buton.

Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi lingkup Pemerintah Kabupaten Buton ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Panitia diberikan setiap kegiatan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XLVI. HONORARIUM TIM/PANITIA SELEKSI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN BUTON, DAN TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN.

| NO | URAIAN | JUMLAH ORANG MAX | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|---------------------------------|------------------|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | PANITIA SELEKSI | | | |
| | 1. Ketua | 1 | OK | 10.000.000,- |
| | 2. Sekretaris | 1 | OK | 8.000.000,- |
| | 3. Anggota | 1 | OK | 6.000,000,- |
| B. | SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI | | | |
| | 1. Koordinator | 1 | OK | 2.000.000,- |
| | 2. Anggota | 12 | OK | 1.000.000,- |
| C. | TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN | 3 | OK | 6.000,000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Tim/Panitia Seleksi Anggota Direksi Dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Buton, Dan Tim Uji Kelayakan Dan Kepatan.

Pembentukan Tim/Panitia Seleksi Anggota Direksi Dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kabupaten Buton, Dan Tim Uji Kelayakan Dan Kepatan ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Honorarium Panitia diberikan setiap kegiatan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XLVII. UANG MAKAN PETUGAS POL.PP, PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN, UNIT REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATPAM RSUD

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp.) |
|----|---|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Petugas Polisi Pamong Praja/ Petugas Pemadam Kebakaran /URC Penanggulangan Bencana/ Satpam RSUD | OB | 250.000,- |

Uang makan diberikan kepada Non ASN pada Pol. PP, Petugas pemadam Kebakaran, Unit Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Dan Satpam RSUD.

Uang makan diberikan setiap bulan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

XLVIII. BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp.) |
|----|--------------------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Uang lembur | | |
| | a. Pegawai Tidak Tetap/Non PNS | OJ | 10.000,- |
| | b. PNS Golongan I | OJ | 13.000,- |
| | c. PNS Golongan II | OJ | 17.000,- |
| | d. PNS Golongan III | OJ | 20.000,- |
| | e. PNS Golongan IV | OJ | 25.000,- |
| 2. | Uang makan lembur | OH | 35.000,- |
| 3. | Snack | OH | 15.000,- |

Uang lembur dan Uang makan lembur diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Non ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja lembur.

Surat Perintah Kerja Lembur ditetapkan oleh Kepala SKPD. Dan Besaran Uang Lembur dan Uang Makan Lembur ditetapkan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran.

Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dapat diberikan dengan ketentuan yang melaksanakan kerja lembur berada dalam satu SKPD dan tidak dalam pelaksanaan perjalanan Dinas

Uang Lembur dan Uang Makan Lembur dianggarkan pada DPA- SKPD.

XLIX. SATUAN BIAYA UANG MAKAN MINUM RUMAH TUNGGU KELAHIRAN

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp.) |
|----|------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Uang Makan Pasien Persalinan | 3 kali/hari | 75.000,- |

L. SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM RAPAT

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp.) |
|----|-------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Makanan Kotak | OKL | 40.000,- |
| 2. | Snack | OKL | 15.000,- |
| 3. | Makanan Prasmanan | OKL | 80.000,- |

LI. BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DAN PERALATAN

| NO | JENIS KENDARAAN | BESARNYA CC/SILINDER | JATAH LITER MAKSIMAL PERHARI | KET. |
|----|----------------------------|----------------------|------------------------------|------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1. | KENDARAAN PERORANGAN DINAS | | | |
| | a.Sedan | 2.000 - Keatas | 29 | |
| | b.Jepp | 2.000 - Keatas | 29 | |
| | c. Mini Bus | 2.000 - Keatas | 29 | |

| | | | | |
|----|---|----------------|-----|--|
| 2. | KENDARAAN DINAS JABATAN | | | |
| | a. Mini Bus : | | | |
| | 1) Sekretaris Daerah | 2.000 – Keatas | 29 | |
| | 2) Kepala SKPD: | 1.200 - 2.000 | 15 | |
| | | 2.000 – Keatas | 17 | |
| | b. Kendaraan Roda 2 | 110 – 150 | 2 | |
| | | 150 - Keatas | 3 | |
| 3. | KENDARAAN DINAS OPERASIONAL | | | |
| | a. Mini Bus | 1.200- 2.000 | 15 | |
| | | 2.000 - Keatas | 17 | |
| | b. Pick Up / Doubel Cabin | 1.200 - 2.000 | 15 | |
| | | 2.000 - Keatas | 17 | |
| | c. Pick Up / Doubel Cabin Patwal Bupati/Wakil Bupati | 2.000 - Keatas | 29 | |
| | d. Bus | 2.000 - 3.000 | 20 | |
| | | 3.001 - 4.000 | 22 | |
| | | 4.000 - Keatas | 25 | |
| | e. Truk | 1.700 - 2.000 | 15 | |
| | | 2.001 - 3.000 | 20 | |
| | | 3.000 Keatas | 25 | |
| | f. Sepeda Motor | 110 - 150 | 3 | |
| | | 150 - Keatas | 5 | |
| | g. Kendaraan Air | | | |
| | h. Speed Boat | 25 PK | 50 | |
| | | 40PK | 70 | |
| | | 80 PK | 150 | |
| | | 150 PK | 200 | |
| | | 200 PK | 300 | |
| 4 | PERALATAN | | | |
| | Diesel Generator | 25 - 50 KvA | 3 | |
| | | 50 - 150 KvA | 5 | |
| | | 150 - 350 KvA | 7 | |
| | | 350 KvA Keatas | 10 | |
| | Mesin potong rumput | | 3 | |

BBM untuk Kendaraan dinas diberikan kepada:

- a. Bupati dan wakil bupati untuk kendaraan perorangan dinas;
- b. Pimpinan DPRD yang menggunakan kendaraan dinas jabatan; dan
- c. Kepala SKPD dan/atau pejabat lainnya pada SKPD yang menggunakan kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan operasional.

Jenis dan besarnya CC/silinder kendaraan dinas untuk setiap pengguna kendaraan dinas disesuaikan dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Barang menetapkan pemegang/pengguna kendaraan dinas di lingkungannya masing-masing.

Adapun jenis BBM menyesuaikan dengan jenis kendaraan dinas yang digunakan. Selanjutnya untuk menghitung besaran uang BBM dihitung dengan melakukan perkalian antara jumlah liter BBM yang digunakan dengan harga setiap jenis BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penyediaan BBM oleh SKPD dilakukan melalui pembelian secara langsung atau dapat dilakukan melalui kerjasama dengan SPBU atau penyedia BBM

lainnya. Pembelian BBM secara langsung dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyediaan BBM dilakukan melalui kerjasama dengan SPBU atau penyedia BBM Lainnya, Kepala SKPD menerbitkan Surat penunjukan Penyedia BBM. Pembelian atau pengisian BBM kendaraan dinas di SPBU atau penyediaan BBM lainnya dapat dilakukan melalui surat pesanan atau pembelian tunai. Surat pesanan dapat berupa nota atau kupon pengambilan BBM. Untuk penggunaan jenis kendaraan air dan peralatan, pemberian BBM dilengkapi dengan kwitansi pembelian BBM dari SPBU atau penyedia BBM.

BBM diberikan setiap bulan kepada pengguna kendaraan dinas. Dalam hal kendaraan dinas digunakan untuk perjalanan dinas, Pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan BBM dan tidak lagi diberikan biaya transportasi perjalanan dinas. Jumlah liter BBM bagi pelaksana perjalanan dinas diberikan sesuai dengan kebutuhan riil. Untuk itu pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas wajib menunjukkan kwitansi pembelian BBM. Jumlah hari selama perjalanan dinas diperhitungkan untuk menentukan besaran BBM yang diberikan kepada pengguna kendaraan dinas pada bulan berikutnya.

Dikecualikan dari ketentuan pemberian BBM yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Kendaraan Dinas yang masuk dalam objek pemanfaatan barang milik daerah.

LII. HONORARIUM TIM PENDAMPINGAN HUKUM PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

| NO | URAIAN | JUMALH ORANG MAX | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|------------------------|------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jaksa Pengacara Negara | 6 | OB | 2.500,000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kejaksaan Negeri Buton selaku Jaksa Pengacara Negara yang bertugas sebagai Tim pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Buton.

Pelaksanaan kegiatan pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Buton, berdasarkan *Memorandum Of Understanding (MOU)* antara Pemerintah Kabupaten Buton dengan Kejaksaan Negeri Buton tentang Pendampingan Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Buton.

LIII. HONORARIUM TIM REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH/TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN REALISASI ANGGARAN DAERAH/TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA.

| NO | URAIAN | JUMALH ORANG MAX | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|-----------------|------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pengarah | 1 | OB | 3.500,000,- |
| 2. | Penanggungjawab | 1 | OB | 2.500.000,- |
| 3. | Ketua | 1 | OB | 2.500.000,- |
| 4. | Sekretaris | 1 | OB | 2.000.000,- |

| | | | | |
|----|-------------|----|----|-------------|
| 5. | Anggota | 25 | OB | 1.500.000,- |
| 6. | Sekretariat | 10 | OB | 1.000.000,- |

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai Tim Rekonsiliasi Pendapatan Dan Belanja Daerah, Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Realisasi Anggaran Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Negara.

Pembentukan Tim Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Daerah, Tim Evaluasi Dan Pengawasan Penyerapan Realisasi Anggaran Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Negara. Ditetapkan dengan keputusan Bupati sedangkan Penetapan Besaran Honorarium ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

Honorarium Panitia diberikan setiap bulan dan dianggarkan pada DPA - SKPD.

LIV. HONORARIUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BANZAZ) KABUPATEN BUTON

| NO | URAIAN | JUMALH ORANG MAX | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|-------------|------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ketua | 1 | OB | 2.500,000,- |
| 2. | Wakil Ketua | 4 | OB | 2.500.000,- |

Honorarium diberikan kepada Ketua dan Anggota Badan Amil Zakat Kabupaten Buton yang bersumber dari APBD Kabupaten Buton. Penetapan Ketua dan Anggota Badan Amil Zakat Kabupaten Buton ditetapkan dengan Keputusan Bupati Buton.

LV. HONORARIUM TIM /GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN BUTON

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|---------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ketua | OB | 4.000.000,- |
| 2. | Wakil Ketua 1 | OB | 3.500.000,- |
| 3. | Wakil Ketua 2 | OB | 3.500.000,- |
| 4. | Wakil Ketua 3 | OB | 3.500.000,- |
| 4. | Sekretariat | | |
| | - Sekretaris Daerah | OB | 3.000.000,- |
| | - Kepala BPBD | OB | 2.750.000,- |
| | - Sekratriis BPBD | OB | 2.500.000,- |
| | - Staf BPBD | OB | 2.000.000,- |

| | | | |
|----|--|----|-------------|
| 5. | Anggota | | |
| | Bidang Humas | | |
| | - Koordinator/Penanggungjawab | OB | 2.250.000,- |
| | - Anggota | OB | 2.000.000,- |
| | Bidang Perencanaan, Data, pakar dan Analisis | | |
| | Koordinator/Penanggungjawab | OB | 2.250.000,- |
| | - Anggota | OB | 2.000.000,- |
| | Bidang Operasi | | |
| | - Ketua/Penanggungjawab | OB | 2.250.000,- |
| | - Anggota | OB | 2.000.000,- |
| | Bidang Pencegahan | | |
| | - Koordinator/Penanggungjawab | OB | 2.250.000,- |
| | - Anggota | OB | 2.000.000,- |
| | Bidang Penanganan | | |
| | - Koordinator/Penanggungjawab | OB | 2.250.000,- |
| | - Anggota | OB | 2.000.000,- |
| | Bidang Pemulihan Dan layanan Dasar | | |
| | - Koordinator/Penanggungjawab | OB | 2.250.000,- |
| | - Anggota | OB | 2.000.000,- |
| | Bidang Pengamanan dan GAKUM | | |
| | - Koordinator/Penanggungjawab | OB | 2.250.000,- |
| | - Anggota | OB | 2.000.000,- |
| | Bidang Logistik | | |
| | - Koordinator/Penanggungjawab | OB | 2.250.000,- |
| | - Anggota | OB | 2.000.000,- |
| | Bidang Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah | | |
| | - Koordinator/Penanggungjawab | OB | 2.250.000,- |
| | - Anggota | OB | 2.000.000,- |
| | Bidang Penyiapan dan Penggunaan ALKES | | |
| | - Koordinator/Penanggungjawab | OB | 2.250.000,- |
| | - Anggota | OB | 2.000.000,- |
| | | | |
| | Bidang Administrasi | | |
| | - Koordinator/Penanggungjawab | OB | 2.250.000,- |
| | - Anggota | OB | 2.000.000,- |
| | Bidang Keuangan | | |
| | - Koordinator/Penanggungjawab | OB | 2.250.000,- |
| | - Anggota | OB | 2.000.000,- |
| | Bidang Akuntabilitas Pengawasan | | |
| | - Koordinator/Penanggungjawab | OB | 2.250.000,- |
| | - Anggota | OB | 2.000.000,- |
| | PUSDALOPS | | |
| | - Koordinator/Penanggungjawab | OB | 2.250.000,- |
| | - Anggota | OB | 2.000.000,- |

Honorarium tim/gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) Kabupaten Buton di berikan kepada masing masing personil tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Buton. Honorarium yang berikan kepada Tim tim/gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) bersumber dari Belanja Bantuan Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Buton.

Pemberian Honorarium TIM sebagaimana dimaksud diatas, terhitung sejak penetapan Status Siaga Darurat/Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sampai pada saat Status Siaga Darurat, Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan selesai.

Adapun tugas dan tanggungjawab tim/ gugus tugas percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) Kabupaten Buton yakni:

1. Menetapkan rencana Operasi dan Penanganan;
2. Mengkoordinasikan dan Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan;
3. Melakukan pengawasan pelaksanaan;
4. Mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan;
5. Melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat,Protokoler dan dukungan kesekretariatan;
6. Melaksanakan Komunikasi Publik, agenda setting, dan strategi komunikasi, media monitoring;
7. Mengumpulkan data,analisis,kajian,Policy Brief,Protokol Nasional,Perencanaan dan Laporan Capaian;
8. Melaksanakan pencegahan,penanganan dan pemulihan di daerah;
9. Melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antara instansi;
- 10.Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi;
- 11.Melaksanakan penegakan hukum didaerah secara menyeluruh dan dan terkoordinasi antar instansi;
- 12.Memberikan dukungan pengadaan logistik peralatan darurat di daerah;
- 13.Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumber daya daerah;
- 14.Menyediakan logistik peralatan darurat di daerah;
- 15.Melaksakan tata usaha administrasi;
- 16.Melaksanakan penataan laporan pertanggungjawaban keuangan;dan
- 17.Melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja, pengumpulan dan pengolahan data base, dan pengembangan sistem informasi komunikasi elektronik.

LVI. UANG LELAH TIM PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BUTON

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|------------------------------------|--------|---------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Koordiantor POSKO (BPBD) | OH | 100.000,- |
| 2. | Anggota (ASN, Non ASN dan Relawan) | OH | 75.000,- |

Pembayaran uang lelah yang diberikan kepada ASN dan Non ASN dan relawan bersumber dari Dana Siap Pakai, yang digunakan untuk untuk semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut sebagai tim dalam Status Siaga Darurat dan atau tanggap darurat Bencana.

Perhitungan jumlah kerja harian tim dimulai pada saat penetapan Status Siaga Darurat dan atau tanggap darurat Bencana sampai pada saat Status Siaga Darurat dan atau tanggap darurat Bencana dinyatakan selesai.

LVII. STANDAR BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KEBUTUHAN TIM/RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BUTON

| NO | URAIAN | SATUAN | JATAH LITER MAKSIMAL PER HARI |
|----|-----------------------------|--------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| | KENDARAAN RODA DUA | | |
| 1. | Kecamatan Pasarwajo | OH | 5 |
| 2. | Kecamatan Kapuntori | OH | 12 |
| 3. | Kecamatan Lasalimu | OH | 10 |
| 4. | Kecamatan Lasalimu Selatan | OH | 9 |
| 5. | Kecamatan Wabula | OH | 7 |
| 6. | Kecamatan Wolowa | OH | 7 |
| 7. | Kecamatan Siotapina | OH | 8 |
| | KENDARAAN RODA EMPAT | | |
| 1. | Kecamatan Pasarwajo | OH | 12 |
| 2. | Kecamatan Kapuntori | OH | 30 |
| 3. | Kecamatan Lasalimu | OH | 30 |
| 4. | Kecamatan Lasalimu Selatan | OH | 25 |
| 5. | Kecamatan Wabula | OH | 15 |
| 6. | Kecamatan Wolowa | OH | 15 |
| 7. | Kecamatan Siotapina | OH | 15 |

Pemberian biaya Bahan Bakar Minyak diberikan kepada TIM dan Relawan penaggulangan Bencana COVID-19 yang menggunakan kendaraan Roda Dua dan atau Roda Empat, dengan tempat keberangkatan dari pasarwajo ke kecamatan tujuan pergi pulang.

Pemberian Biaya bahan bakar minyak dapat diberikan hanya kepada tim dan atau Relawan yang menggunakan kendaraan roda dua dan atau roda empat yang tidak dibebankan pada anggaran SKPD.

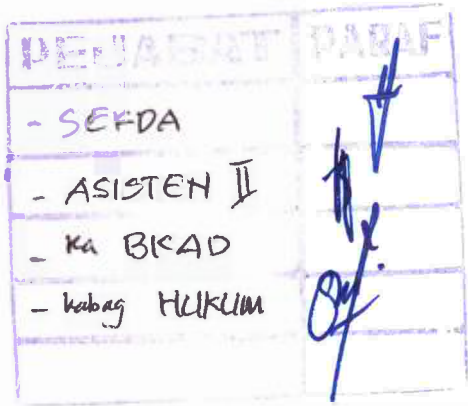
LVIII. HONORARIUM GURU MATA PELAJARAN DAN GURU KELAS YANG BERSUMBER DARI DANA BOS

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|---------------------|--------|---------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Guru Mata Pelajaran | OJ | 25.000,- |
| 2. | Guru Kelas | OH | 750.000,- |

Pembayaran Honorarium yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah, yaitu untuk Guru mata Pelajaran dan Guru kelas pada satuan pendidikan sekolah Menengah Pertama lingkup Kabupaten Buton, Guru mata Pelajaran dan Guru kelas sebagaimana dimaksud diatas yaitu guru Honorer yang telah memiliki SK Bupati, SK Kepala Dinas dan atau SK Kepala Sekolah tentang Penunjukan/Pengangkatan sebagai guru Honorer pada satuan pendidikan sekolah Menengah Pertama.

LIX. HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI
(SIMDA KEUANGAN/SIMGAJI/SIMDA BMD)

| NO | URAIAN | VOLUME | BIAYA (Rp) |
|----|---|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Honorarium Pengelola Simda Keuangan/ Simgaji /Simda BMD | | |
| | a. Tenaga Admin | OB | 350,000,- |
| | b. Supervisor | OB | 300,000,- |
| | c. Operator | OB | 250,000,- |



BUPATI BUTON

LA BAKRY

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 21 TAHUN 2020
TANGGAL : 4 Agustus 2020
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

I. HONORARIUM PERSONIL BAND, PENARI DAN PENABUH/PENGIRING, TEKHNISI PANGGUNG

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp.) | KET |
|----|------------------------------|--------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Personil Band | OJ | 150.000,- | Max 7 Jam |
| 2 | Penari | OK | 150.000,- | |
| 3. | Penabuh | OK | 100.000,- | |
| 4. | Crew Alat Band | OH | 500.000,- | |
| 5. | Penata Panggung (Stage Crew) | OK | 500.000,- | |
| 6. | Sound Sistem Engineering | OJ | 150.000,- | |

II. HONORARIUM INSTRUKTUR/PELATIH DAN PERSONIL MARCHING BAND.

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp.) | KET |
|----|--------------------|--------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Instruktur/Pelatih | OJ | 100.000,- | Max 8 Jam/Bulan |
| 2 | Peserta/ Personil | OB | 75.000,- | |

III. HONORARIUM PETUGAS/PERSONIL UPACARA HARI – HARI BESAR

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp.) |
|-----|--|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Perwira Upacara | OK | 650.000,- |
| 2. | Perwira Keamanan | OK | 550.000,- |
| 3. | Komandan Upacara | OK | 450.000,- |
| 4. | Pengatur Upacara/Protokoler | OK | 300.000,- |
| 5. | Petugas Pembaca Naskah/Teks | OK | 250.000,- |
| 6. | Petugas Pembawa/Pengibar Bendera. | OK | 250.000,- |
| 7. | Pembawa Acara | OK | 250.000,- |
| 8. | Pembaca Doa | OK | 250.000,- |
| 9. | Pembawa Obor Induk | OK | 250.000,- |
| 10. | Cadangan Personil Upacara(Perwira Upacara/ Perwira Keamanan/Komandan Upacara) | OK | 200.000,- |
| 11. | Peliput Kegiatan | OK | 150.000,- |
| 12. | Petugas Bantuan Komonikasi | OK | 250.000,- |
| 13. | Personil Korp Musik (KORSIK) | OK | 100.000,- |

IV. UANG HARIAN PESERTA DEMO TENUN.

| NO | URAIAN | JUMLAH ORANG MAX | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|--------------------------------|------------------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Uang Harian Peserta Demo Tenun | 200 | OH | 350.000,- |

V. HONORARIUM TENAGA AHLI/PROFESIONAL KHUSUS KEGIATAN/EVEN BUDAYA DAN KEPARIWISATAAN.

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|---|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | PEMAIN MUSIK TRADISIONAL DAN KREASI : | | |
| | a. Penabuh | OK | 1.750,000,- |
| | b. Pemain Band | OJ | 150,000,- |
| | c. Pelatih | OK | 2.000,000,- |
| | d. Pemain Gambus | OK | 1.000,000,- |
| 2. | TARIAN | | |
| | a. Penari | OK | 2.000,000,- |
| | b. Penata Rias | OK | 2.000,000,- |
| | c. Pelatih | OK | 2.000,000,- |
| 3. | FASHION SHOW | | |
| | a. Model | OK | 2.500,000,- |
| | b. Desainer | OK | 3.000,000,- |
| 4. | PENJAGA STAND PAMERAN | OJ | 100.000,- |
| 5. | PEMANDU WISATA/GUIDE | OK | 1.500,000,- |
| 6. | DIVING | | |
| | a. Instruktur | OK | 2.000,000,- |
| | b. Dive Master | OK | 2.000,000,- |
| 7. | FESTIVAL BUDAYA TUA /TRADISIONAL | | |
| | a. Peserta Posuo | OK | 400,000,- |
| | b. Dukun/Bhisa | OK | 1.000,000,- |
| | c. Lebe Posuo | OK | 400.000,- |
| | d. Peserta Pedoledole | OK | 500,000,- |
| | e. Pakande Kande (penjaga talang) | OK | 750,000,- |
| | f. Peserta Tandaki | OK | 750,000,- |
| | g. Peserta Posusu | OK | 750,000,- |
| 8. | TENAGA AHLI | | |
| | a. Tenaga Ahli Sound Sistem Engineering | OJ | 150,000,- |
| | b. Crew Alat Band | OH | 500.000,- |
| | c. Penata Panggung (Stage Crew) | OK | 500.000,- |
| | d. Disigner Lokasi Kegiatan | OK | 2.000.000,- |
| | e. Penyanyi Lokal | O/Lagu | 150.000,- |

| | | | |
|----|-------------------|----|-------------|
| | f. DewanJuri | OK | 1.500.000,- |
| | g. Pemandu Wisata | | |
| | 1) Instruktur | OH | 600.000,- |
| | 2) Guide | OH | 350.000,- |
| 9. | Hadiah Lomba | | |
| | a. Perseorangan | | |
| | - Juara I | OK | 3.000.000,- |
| | - Juaara II | OK | 2.500.000,- |
| | - Juara III | OK | 2.000.000,- |
| | b. Beregu | | |
| | - Juara I | OK | 5.000.000,- |
| | - Juaara II | OK | 4.000.000,- |
| | - Juara III | OK | 3.000.000,- |

VI. HADIAH LOMBA PENYELENGRAAN KEGIATAN SELEKSI TILAWATIL QURAN (STQ), MUSABAQAH TILAWATIL QURAN (MTQ), LEMBAGA SENI DAN QASIDAH INDONESIA (LASQI).

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|-------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | PERORANGAN | | |
| | - Juara I | OK | 3.000.000,- |
| | - Juara II | OK | 2.750.000,- |
| | - Juara II | OK | 2.500.000,- |
| 2. | PERGROUP/KELOMPOK | | |
| | - Juara I | OK | 5.000.000,- |
| | - Juara II | OK | 4.500.000,- |
| | - Juara II | OK | 4.000.000,- |

VII.HONORARIUM PENCERAMAH/PENDAKWAH KHUSUS KEGIATAN KEAGAMAAN.

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|--|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Penceramah/Pendakwah Dari Luar Daerah | OK | 25.000.000,- |
| 2. | Penceramah/Pendakwah Dari Dalam Daerah | OK | 25.000.000,- |

VIII. HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN (PARIWISATA)

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp.) |
|----|-----------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pengarah | OK | 2.000.000,- |
| 2. | Penanggungjawab | OK | 1.500.000,- |
| 3. | Ketua | OK | 1.250.000,- |

| | | | |
|-----|-------------------|----|-------------|
| 4. | Wakil Ketua | OK | 1.000.000,- |
| 5. | Sekretaris Umum | OK | 1.000.000,- |
| 6. | Bendahara Umum | OK | 1.000.000,- |
| 7. | Wakil Bendahara | OK | 800.000,- |
| 8. | Pembantu Umum | OK | 750.000,- |
| 9. | Koordinator Seksi | OK | 750.000,- |
| 10. | Anggota Seksi | OK | 400.000,- |

IX. BIAYA JASA/TENAGA AHLI/PROFESIONAL (SHOW ARTIS)

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|------------------|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Grup Musik/Band | Paket /even | 250.000.000,- |
| 2. | Artis Penyanyi | Orang/even | 75.000,000,- |
| 3. | Asisten/Manajer | Orang/even | 5.000,000,- |
| 4. | Artis Liputan | Orang/even | 25.000,000,- |
| 5. | Disc Jockey (DJ) | Orang/even | 25.000,000,- |

X. SEWA BARANG/JASA KEGITAN PAMERAN/SHOW

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|------------------------------------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Lighting/Lampu | Paket/Hari | 30.000.000,- |
| 2. | Rigging Gantung Sound Sistem | Paket/Hari | 15.000.000,- |
| 3. | Rigging Gantungan Ligting/ Lampu | Paket/ Hari | 10.000.000,- |
| 4. | Sewa Tenda | Petak, local /Hari | 600.000,- |
| 5. | Sewa Tenda Krucut/Karnavil | Petak, local /Hari | 700.000,- |
| 6. | Stand Pameran Luar Daerah | Meter | 5.000.000,- |
| 7. | Dekorasi Stand Pameran Luar Daerah | Meter | 75.000.000,- |
| 8. | Multi media | Paket /Hari | 10.000.000,- |
| 9. | LED Screen | Paket /Hari | 5.000.000,- |
| 10. | Cetak Baliho dan Umbul-Umbul | Paket /Meter | 50.000,- |

XI. TENAGA AHLI /PROFESI/ PENYUSUN DOKUMEN / NASKAH AKADEMIK/PENILAI BMD / SAKSI AHLI PERSIDANGAN

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|--|--------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Tenaga Ahli /Profesi/ Penyusun Dokumen / Naskah Akademik/Penilai BMD | Paket | 100.000.000,- |

| | | | |
|----|------------------------------|--------|--------------|
| | | | |
| 2. | Saksi Ahli dalam Persidangan | O/Kali | 50.000.000,- |

XII. TENAGA AHLI /PROFESI/ PELIPUTAN

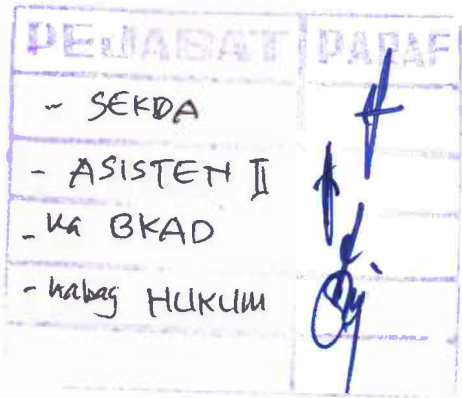
| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|---|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Tenaga Ahli /Profesi Peliputan Dalam Daerah | OK | 500.000,- |
| 2. | Tenaga Ahli /Profesi Peliputan Luar Daerah | OK | 1.000,000,- |

XIII. SEWA BARANG/JASA KEGIATAN TIM PECEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN KABUPATEN BUTON (TP2K KB/TIM PUSAT)

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|---------------------------------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sewa Kantor (Tim Pusat/ Jakarta) | Unit/Tahun | 30.000.000,- |
| 2. | Sewa/Rental Mobil (Tim Pusat/Jakarta) | Unit/Bulan | 2.000.000,- |

XIV. TENAGA AHLI/PEROFESIONAL PELIPUT BERITA NASIONAL

| NO | URAIAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|----|--|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Tenaga Ahli/Perofesional Peliput Berita Nasional | OK | 2.500.000,- |



BUPATI BUTON,

 LA BAKRY